

Analisis Penetapan Komoditas Unggulan Hasil Perkebunan dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Strategi Pengembangannya di Provinsi Kalimantan Selatan

Budi Rofelawaty

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin
Jl. H. Hasan Basry no. 9-11 Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Non Timber Florest Product (NTFPs), superior commodity, Location Quotients (LQ).

This study aims to analyze the superior commodity of non-timber forest products and their development strategy in South Kalimantan Province. The selection of research locations was carried out in all districts / cities in South Kalimantan province by using secondary data from Badan Pusat Statistik, and other relevant data. Using the Location Quotient (LQ) analysis tool. Based on the results of the LQ analysis, it shows that for the non-gaharu wood forest products group and is the leading commodity for Tabalong, Kotabaru and Banjar districts, cinnamon is the leading commodity for Hulu Sungai Selatan Regency. Meanwhile, rubber, candlenut and oil palm plantations are the main commodities for Tabalong Regency and Hulu Sungai Selatan Regency as well as Kota Baru Regency and Banjar Regency. The strategy for development is to carry out integrated development with a pattern of partnerships and cooperation between stakeholders and farmer groups and to promote programs related to the development of NTFPs seeds through extension activities, disseminating information and strengthening networks.

✉ Corresponding Author:
Budi Rofelawaty:
Tel. /Fax.
E-mail:

© 2020 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pada era tahun 1980-an instalasi industri per kayu berkembang begitu pesatnya dengan tidak mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan usaha. Kondisi hutan sekarang mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, dikarenakan laju kerusakan hutan yang terjadi setiap tahunnya mencapai dua kali lipatnya sebagaimana yang disampaikan world bank bahwa laju kerusakan hutan diperkirakan 700 - 1.200.000 ha setiap tahunnya, sedangkan menurut FAO menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha pertahun atau setiap tahun luas

areal berkurang sebesar 1%. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya larangan ekspor kayu bulat dan mendorong pesatnya pertumbuhan industri berbasis kayu. Dalam konteks ekonomi pemanfaatan hutan selama ini masih memandang hutan sebagai sumber daya alam penghasil kayu. Kondisi ini mendorong eksploitasi kayu secara intensif untuk memenuhi pasar dunia maupun pasar domestik, tanpa memperhatikan nilai manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan.

Akhir-akhir ini setelah produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun, dan diiringi juga dengan berkurangnya kualitas hutan alam di seluruh Indonesia, termasuk

juga penurunan produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang merupakan akibat dari penurunan luas dan kualitas ekosistem hutan sebagai sitem sumber daya alam yang memiliki potensi untuk mmberi manfaat multiguna (disamping hasil kayu, juga bermanfaat untuk hasil hutan bukan kayu dan lingkungan). Degradasi hutan di Indonesia sudah mengalami tekanan-tekanan sejak tahun 1950 dan lebih meningkat lagi setelah diundangkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1970-an, dengan era dimulainya eksploitasi hutan secara besar-besaran sebagai sumber devisa dalam rangka pembangunan nasional, kemudian tekanan tersebut semakin kencang akhir akhir ini yang diakibatkan oleh *illegal logging*, *over cutting*, perambahan yang disertai pendudukan lahan hutan, serta afanya bencana alam seperti kebakaran hutan dan lain-lain. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan RI, luas lahan sangat kritis dan lahan kritis pada akhir Pelita VI (awal tahun 1999/2000) seluas 23.242.881 ha terdiri 35% dalam kawwasan hutan dan 65 % luar kawasan hutan. Pulau-pulau yang mengalami deforestasi terbesar dalam kurun waktu 1985-1997 adalah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan yang secara keseluruhan kehilangan tutupan lahannya lebih dari 20% (GoI/World Bank, 2000).

Sejalan dengan itu, ke depan pembangunan kehutanan diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada hasil hutan pada hasil hutan kayu, tetapi sudah selayaknya menggali potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki potensi ekonomis dan perlu digali dan dioptimalkan pengelolaan, pemanfaatan, maupun pemungutannya. Jenis-jenis pohon hutan penghasil komoditas HHBK memunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat di sekitar hutan. Beberapa jenis produk HHBK di Kalimantan Selatan telah lama diusahakan dan diambil hasilnya oleh masyarakat sekitar hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan sebagian masyarakat menggunakan

produk HHBK sebagai sumber utama atau bahkan satu-satunya sumber penghasilan mereka.

Untuk melihat potensi nilai ekonomi serta kontribusi HHBK, kami berkeinginan untuk melakukan kajian serta analisis guna menetapkan komoditas unggulan HHBK di provinsi Kalimantan Selatan guna dijadikan acuan dalam menyusun strategi pengembangannya. Sehingga pengembangan dan pengusahaan industri HHBK tersebut akan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan bahkan devisa negara.

2. METODE PENELITIAN

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam Pulau Kalimantan. Wilayah provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan, yang terdiri dari 13 Kabupaten dan Kota. Lokasi penelitian dilakukan pada 13 Kabupaten/kota sebagai wilayah pengamatan, dengan waktu pengamatan selama 5 tahun, yaitu tahun 2013 - 2017.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan dokumentasi bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, dan sumber lainnya untuk memperkaya data analisis dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA). Analisis *Location Quotient* (LQ) menurut Joesoef (2011) adalah suatu perbandinagn antara besarnya peran suatu sektor di suatu daerah (*region*) terhadap besarnya peran sektor tersebut ditingkat nasional. Sedangkan *Shift Share Analysis* (SSA) adalah analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data menurut sub sektor selama tiga tahun terakhir (2015 - 2017),

kemudian di insert data ke dalam *spread-sheet* dengan format kolom dan baris. Kolom diisi dengan nama wilayah dan tahun sedangkan baris diisi dengan jenis komoditas HHBK yang akan dianalisis.

2. Menghitung nilai rata-rata produksi untuk setiap wilayah.
3. Menjumlahkan luas areal panen dari tiap komoditas atau populasi HHBK menurut wilayah.
4. Menghitung LQ
5. Analisis LQ digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor merupakan basis di daerah tersebut, sedangkan analisis SSA untuk menentukan apakah komoditas tersebut merupakan komoditi unggulan untuk daerah tersebut.
6. Menginterpretasi nilai LQ, dengan ketentuan nilai LQ yang diperoleh akan berada di kisaran lebih kecil atau sama dengan satu sampai lebih besar dari angka 1 atau $1 > LQ > 1$. Besaran nilai LQ menunjukkan besaran derajat spesialisasi atau konsentrasi dari komoditas itu di wilayah yang bersangkutan relatif terhadap wilayah referensi dalam hal ini Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Menghitung nilai unggulan HHBK.
8. Menginterpretasi hasil nilai unggulan HHBK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian Profil Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam, dengan kehidupan masyarakat yang memiliki ciri khas kebudayaan daerah yang menonjol dalam kesehariannya. Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan peraturan Undang – Undng No. 5 tahun 1956, yang beribukota provinsi adalah Banjarmasin, dan wilayahnya terdiri dari 13 kabupaten/kota, 152 kecamatan dan 2008 desa/kelurahan. Profil umum wilayah Kabupaten/kota di Provinsi

Kalimantan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Geografi

Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19' 13" - 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" - 4 10' 14" Lintang Selatan. Terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan dan Selat Makasar di sebelah timur. Berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat serta Kalimantan Timur di sebelah utara.

Luas wilayah administrasi adalah 37.530,52 km² atau sebesar 6,98% dari luas Pulau Kalimantan atau 1,96% dari luas Indonesia, dengan luasan dari sisi penggunaan tanah sebagian besar masih merupakan hutan (35,85%), alang-alang, rumput/raja, dan tegalan/ladang (26,07%), lahan perkebunan (921,48%), persawahan (10,74%), dan tambak, sungai/danau/waduk/telaga (2,12%).

Penggunaan lahan untuk perumahan sekitar 2,32% dan untuk pertambangan sekitar 1,42%. Struktur geologi tanah sebagian besar (30,90%) adalah tanah basah (*alluvial*), sehingga cocok untuk meningkatkan potensi perekonomian melalui sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian sepanjang daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,81% wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15% dan 31,09% wilayah berada di ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki sekitar 60 sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar, serta 82 gunung.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah tropis, yang pada tahun 2015 memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, dan temperatur udara sekitar 22,0°C (bulan September) hingga 36,4°C pada bulan Oktober.

Penduduk, dan Ketenagakerjaan

Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka 2017 untuk proyeksi tahun 2016 sebanyak 4055,5 ribu jiwa yang terdiri atas 2.056,1 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 1.999,6 ribu jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk mencapai 108,10 jiwa/km², dengan Kabupaten/kota yang kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.414,9 /Km² dan terendah terletak di Kabupaten Kotabaru sebesar 34,6 jiwa/Km². Untuk masalah ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sebanyak 35.333 pekerja.

Perkebunan dan Kehutanan

Perkebunan di Provinsi Kalimantan selatan, mulai menunjukkan peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian. Tanaman perkebunan yang cukup potensial di daerah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan adalah tanaman karet dan kelapa sawit. Luas areal karet mencapai 242.317 ha untuk perkebunan rakyat, 14.509 ha dan 2.474 ha masing-masing untuk luas areal perusahaan perkebunan besar dan negara dan perusahaan perkebunan besar swasta. Produksi kelapa sawit menduduki urutan pertama dengan total produksi mencapai 1,31 juta ton, perkebunan besar swasta mengambil peran dominan yaitu 1,04 juta ton. Produksi karet menempati urutan kedua dengan jumlah produksi sebesar 190.661 ton dimana perkebunan rakyat memberikan kontribusi terbesar yaitu 174.504 ton.

Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brasil dan Kongo dengan luas sekitar 109 juta ha. Oleh karena itu hutan tropis merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi Indonesia, dengan sumbangan yang tinggi bagi pendapatan ekspor, lapang-

an kerja serta sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Menurut Dudley (2002) paling tidak empat belas juta orang bergantung hidupnya secara langsung pada hutan. Di Indonesia hasil hutannya mencapai lebih dari 11% dari pendapatan ekspor selama tahun 1994-1999. Namun sangat disayangkan, kondisi hutan hujan tropis kita saat ini hampir setengahnya telah terdegradasi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara pada peringkat kelima setelah Rusia, Brasil dan Amerika Serikat dan Kanada, yang sebelumnya berada pada peringkat ketiga, dalam hal hilangnya hutan. Lajunya deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya, dikarenakan banyaknya penebangan hutan secara liar, dan banyaknya tambang (tambang minyak, gas dan batubara) yang meninggalkan lubang-lubang besar. Diperkirakan penebangan hutan berlangsung dengan kecepatan 1% per tahun, atau sekitar 20 - 40 ha hutan hilang tiap menit. Menurut FAO tahun 1989, laju kerusakan hutan di Kalimantan mencapai lebih dari 600 ribu ha per tahun, dan merupakan yang paling tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia. (Harun, 2014).

Implementasi MP3EI di Kalimantan Selatan

MP3EI merupakan program yang dilandasi perlunya program nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur dan sektor riil di tanah air. Meski disadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MP3EI, dan program ini terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan, utamanya di luar pulau Jawa terutama di Kalimantan Selatan yang ke depannya masih memerlukan banyak pembangunan infrastruktur seiring dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi. Percepatan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi masih terus dibutuhkan tidak hanya untuk lima tahun ke depan, melainkan juga untuk 10 - 20 tahun berikutnya. MP3EI di Kalimantan memiliki enam simpul kegiatan ekonomi utama, yaitu migas (minyak dan gas), batubara, kelapa sawit, besi

baja, bauksit, dan perkayuan yang tersebar di lima provinsi lingkup Kalimantan (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara).

MP3EI ini merupakan manifestasi dari strategi pencapaian rencana pembangunan jangka panjang di bidang infrastruktur fisik, untuk mengatasi disparitas pembangunan yang selama ini berpotensi menghambat proses perluasan dan percepatan pembangunan. Namun dalam dokumen perencanaan penerapan MP3EI ini ada indikasi pemanfaatan potensi pertambangan yang mengancam keutuhan kawasan-kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya. Apabila program MP3EI ini diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai penting dan strategis dari kawasan-kawasan tersebut maka dikhawatirkan akan menyebabkan tidak konsistennya tujuan MP3EI dengan program nasional seperti RAN-GRK, Konservasi SDA, dan *Indonesian Biodiversity strategy and Action Plan (IBSAP)*.

Kemudian menurunnya tutupan hutan alam ini telah menyebabkan timbulnya berbagai gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan dan satwa liar di pulau Kalimantan, kemudian kehidupan manusia terganggu karena seringnya terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Gagal panen dan kesulitan air bersih merupakan hal yang terus berulang setiap tahunnya dan terjadi di hampir seluruh daratan Kalimantan, sehingga kemiskinan meningkat dan menyebabkan hilangnya sumber pokok masyarakat dan beberapa potensi ekonomi lokal.

Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi sektor kehutanan secara cepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya dalam mendukung percepatan revitalisasi sektor kehutanan tersebut adalah dilaksanakan melalui program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, guna mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan.

Kegiatan yang termasuk dalam program ini diantaranya adalah pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan, pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat (HTR), dan pengembangan hasil hutan bukan kayu. Sehingga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak harus mengeksploitasi hutan.

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kalimantan Selatan.

Pembangunan HTR merupakan proses penguatan kelembagaan kehutanan baru bagi masyarakat yang dimulai dari luasan kecil (satu-dua hektar) dengan kegiatan pokoknya menanam tanaman hutan dengan berdasarkan pada pengalaman menanam masyarakat, pola pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang akan datang dicarikan harus menghindari terjadinya kerusakan lingkungan dan dan menurunnya keanekaragaman hayati.

Para pihak (*Stakeholders*) selayaknya bersinergi untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekosistem sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah disamping hasil kayu yang begitu besar yang dapat dihasilkan dari hutan rakyat (HTR), hasil lain yang memiliki potensi besar dari hutan rakyat adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK). Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki areal pencadangan hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 29,758 ha yang tersebar pada 6 Kabupaten, dengan masing-masing luasan dapat dilihat pada Tabel 1.

Hambatan dan kendala yang dihadapi pengelola HTR di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Busran dan Faizah (2014) diantaranya adalah:

- a. Proses pencadangan areal HTR dimana areal yang dicadangkan belum sepenuhnya *clear* dan *clean*, baik disebabkan karena perambahan, okupasi, perladangan, tumpang tindih peruntukan, ilegal log-

- ging/illegal mining serta penguasaan lahan oleh masyarakat.
- b. Pemahaman beragam dari para pihak terhadap program HTR menyebabkan proses perijinan yang masih sangat lama, kekuatiran bahwa areal yang dibangun menjadi HTR akan diambil oleh pemerintah.
 - c. Penguatan kelembagaan yang belum mantap menyebabkan administrasi HTR seperti RKU dan RKT masih kurang lancar.
 - d. Dari sisi kajian ekonomi, HTR masih dianggap belum menguntungkan, belum adanya jaminan pasar dan harga kayu HTR
 - e. Hubungan antara stakeholders yang belum bersinergi dengan baik. Keberhasilan HTR sangat memerlukan sinergi dari berbagai pihak mulai dari instansi kehutanan tingkat pusat, daerah, kelompok tani maupun tenaga pendamping/fasilitator.
 - f. Kekurangan biaya untuk pendanaan pembangunan HTR termasuk kegiatan penanaman, penataan batas, dan lain-lain.
 - g. Khusus pada Kabupaten Tanah Bumbu areal yang dicadangkan untuk pembangunan HTR umumnya masih merupakan belukar dan hutan sekunder sehingga relatif belum siap untuk ditanam. Kondisi ini mengakibatkan investasi penyiapan lahan lebih besa, bila dibandingkan dengan standar BLU sehingga berakibat pada terhambatnya operasionalisasi pembangunan HTR.

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Salah satu fokus kabinet kerja pada dinas Kehutanan yang tercantum dalam nawa-cita adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran dan mewujudkan kemandiri ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu program sektor kehutanan yang terkait dengan upaya tersebut adalah pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK),

yang merupakan kegiatan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sehingga diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditi AUK yang potensial untuk dikembangkan adalah tanaman pangan (Hutan Cadangan Pangan), tanaman obat (pemanfaatan lahan di bawah tegakan), tanaman kehutanan penghasil buah dan biji, tanaman penghasil getah-getahan dan resin, dan tanaman penghasil minyak atsiri.

Pengembangan AUK didasarkan pada potensi lokal dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu diperlukan adanya identifikasi dan inventarisasi yang mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana produksi, pasar serta kelembagaan dan permodalan. Selain itu, pengembangan AUK tidak dapat dibangun melalui pendekatan produksi saja, tetapi juga harus mempertimbangkan peningkatan kompetensi lokal melalui pendekatan agribisnis yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Kemudian pemanfaatan hasil hutan bukan kayu perlu kearifan, sebab diantara ribuan jenis tumbuhan itu, sebagian merupakan penghasil komoditas yang memiliki nilai jual yang cukup potensial serta dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal dan devisa negara. Beberapa jenis komoditas cukup berperan dalam perdagangan baik di dalam maupun luar negeri, seperti rotan, kayu manis, gaharu. Namun dalam proses pengembangan dan pembangunan produk tersebut perlu dilakukan dengan kearifan.

Penetapan Komoditas HHBK unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Daya Hutan (SDH) memunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia, manfaat yang pertama adalah hasil hutan kayu (HHK) seperti yang saat ini sering di-

gunakan, dan yang kedua Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), karbon dan ekowisata. Untuk Hasil Hutan Kayu (HHK) sekarang sudah berkurang dengan adanya degradasi hutan, oleh karena itu ke depannya pembangunan kehutanan diharapkan tidak lagi berorientasi pada hasil hutan kayu, tetapi sudah selayaknya menggali potensi Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK), sehingga perlu kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan HHBK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang tercantum dalam UU No 41 tahun 1999, yaitu pasal 26 (pemungutan HHBK pada hutan lindung), pasal 28 (pemanfaatan HHBK pada hutan produksi).

Tabel 1. Perkembangan Percadangan Areal HTR di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	SK Percadangan HTR oleh Menhut		
		Nomor	Tanggal	Luas (Ha)
1	Hulu Sungai Selatan	101/Menhut-II/2008	08-04-2008	818
2	Tanah laut	706/Menhut-II/2008	19-10-2008	5.355
3	Banjar	393/Menhut-II/2008	10-11-2008	3.160
4	Tablong	395/Menhut-II/2008	10-11-2008	7.490
5	Kotabaru	44/menhut-II/2010	15-01-2010	3.900
6	Tanah Bumbu	50/Menhut-II/2010	15-01-2010	9.035
Jumlah				29.758

Sumber: BP2HP Wilayah XI Banjarbaru

Tabel 2. Analisis Perhitungan LQ untuk Penetapan Komoditi Unggulan HHBK

Kab/kota	Kayu Manis	Kemiri	Kapuk	Kakao	Gaharu	Karet	Kelapa	Sawit	Kopi	Lada
TALA	0,33	0,002	0,011	0,007	13,35	10,98	0,300	20,22	0,207	1,409
KotaBaru	0,00	0,00	0,00	0,165	8,428	4,291	0,008	56,11	0,272	0,510
Banjar	311	0,010	0,207	0,00	78,30	7,187	0,543	2,098	0,393	0,616
Batola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,658	2,544	1,963	2,792	0,031	0,003
Tapin	0,00	0,00	0,00	0,02	4,180	4,014	0,808	9,161	0,001	0,001
HSS	27,12	0,19	0,002	0,006	9,348	3,639	1,405	6,696	0,050	0,009
HST	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	6,375	14,23	0,969	0,142	0,036
HSU	0,00	0,00	0,00	0,028	0,07	0,513	0,315	0,467	0,150	0,110
Tabalong	0,00	0,023	0,072	0,089	32,82	16,09	0,449	20,06	0,313	0,170
T.Bumbu	0,00	0,00	0,00	0,031	1,270	7,562	0,597	22,76	0,026	0,280
Balangan	0,00	1,78	0,003	0,00	12,89	6,846	0,640	0,817	0,198	0,021
B.Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,850	0,220	0,028	0,036	0,00	0,00
B.Masin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,096	0,030	0,00	0,00	0,00

Sumber: data diolah tahun 2018

Komoditas HHBK yang tersebar di Kabupatejn/kota di provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: (a) Kayu Manis; (b) Kemiri; (c) Kapuk; (d) Kakao; (e) Duren; (f) Karet; (g) Kelapa Dalam; (h) Kelapa Sawit; (i) Kopi; (j) Lada; (k) Karet.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan LQ dapat ditetapkan komoditi unggulan HHBK berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan selatan seperti terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan bahwa untuk kelompok Hasil

Hutan bukan kayu Gaharu dan merupakan komoditi unggulan untuk Kabupaten Tabalong, kabupaten Kotabaru, dan kabupaten Banjar, Kayu manis merupakan komoditi unggulan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan untuk tanaman perkebunan karet, kemiri dan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Kabupaten tabalong dan kabupaten Hulu Sungai selatan serta Kabupaten Kota baru dan kabupaten Banjar. Strategi untuk pengembangan

adalah melakukan pengembangan yang terintegrasi dengan pola kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan kelompok tani dan mempromosikan program-program yang berkaitan dengan pengembangan HHBK benih melalui aktivitas penyuluhan, penyebarluasan informasi dan penguatan jejaring kerja.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komoditas unggulan hasil hutan Bukan Kayu dan strategi pengembangannya di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik, dan data lainnya yang relevan. Menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan bahwa untuk kelompok Hasil Hutan bukan kayu Gaharu dan merupakan komoditi unggulan untuk Kabupaten Tabalong, kabupaten Kotabaru, dan kabupaten Banjar, Kayu manis merupakan komoditi unggulan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan untuk tanaman perkebunan karet, kemiri dan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Kabupaten tabalong dan kabupaten Hulu Sungai selatan serta Kabupaten Kota baru dan kabupaten Banjar. Strategi untuk pengembangan adalah melakukan pengembangan yang terintegrasi dengan pola kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan kelompok tani dan mempromosikan program-program yang berkaitan dengan pengembangan HHBK benih melalui aktivitas penyuluhan, penyebarluasan informasi dan penguatan jejaring kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2013.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2014
Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2015
Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2016
Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2017
Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
Dalam Angka tahun 2018
Busran dan Nunung Khusnul Faizah. 2014
Hutan Tanaman Rakyat di Kalimantan
Selatan. *Majalah Bekantan*. Volume 2.
Hamzirwan, 2007. *Industi mebel, Jurus baru
kuasai Pasar Global*. Kompas. 23 Februari
2007. PP.21
Joesoef,Jose Rizal. 2011. *Analisis Location
Quotient (LQ) versus Analisis Shift Share
(SS)*. www.scribd.com.
Rostiwati, Tati, 2006. *Silvikultur Tanaman
Penghasil HHBK Pusat Litbang Hutan dan
Konservasi alam*. Bogor (unpublished).
Wahyudi, Sayuti Pono, 2013. *Buku pegangan
Hasil Hutan Bukan Kayu*.
Harun Marinus Kristiadi, 2014. *Selamatkan
Hutan Kita: tatapilah Hutan dengan Ma-
ta Hati, Agar Bisa Kau Baca Kalam Ilahi*.
Majalah Bekantan. Volume 2/No.1/2014.